BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan SITIKENCANA di BPPKB Kota Bandung

Salah satu faktor yang berpengaruh supaya terciptanya peningkatan efisiensi kerja adalah terjalinnya suatu komunikasi yang baik dan lancar diantara para pelaksana SITIKENCANA yang ada di BPPKB Kota Bandung. Komunikasi merupakan syarat pertama bagi keberhasilan implementasi kebijakan, dimana para pelaksana harus mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Sehingga proses komunikasi antar pegawai BPPKB Kota Bandung khususnya para aparatur dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Komunikasi menunjukkan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Oleh karena itu, komunikasi akan berhasil dengan baik apabila pesan yang disampaikan dapat dimengerti oleh penerima pesan. Komunikasi merupakan suatu konsep yang dapat dimaknai sebagai sebuah proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak, di mana hal tersebut merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Pada dasarnya, komunikasi memberikan kontribusi besar pada kehidupan masyarakat yaitu memberikan dasar atau fondasi kepada tiap individu pada masyarakat dalam menciptakan partisipasi yang efektif dalam masyarakat. Selain itu, melalui komunikasi memungkinkan lingkungan masyarakat yang kondusif.

Dalam meneliti proses komunikasi, yang diteliti adalah siapa yang menjadi komunikator dan siapa yang menjadi komunikan. Komunikasi merupakan proses yang terus berkesinambungan dimana Proses komunikasi dalam implementasi kebijakan SITIKENCANA di BPPKB Kota Bandung dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai serta pengetahuan aparatur dan semua unsur yang mengandung maksud dan tujuan ke arah yang lebih baik dapat tercapai. Proses komunikasi kebijakan dilakukan melalui transformasi atau penyampaian informasi, melalui kejelasan informasi dan adanya konsistensi penyampaian informasi. Komunikasi harus berlangsung sebagai suatu pola yang berkesinambungan.

Peranan komunikator di dalam strategi komunikasi sangatlah penting, strategi komunikasi harus luwes sedemikian rupa sehingga komunikator sebagai pelaksana kebijakan dapat segera mengadakan perubahan apabila ada suatu faktor yang mempengaruhi. Suatu pengaruh yang menghambat komunikasi bisa datang sewaktu – waktu, faktor – faktor yang mempengaruhi bisa terdapat pada komponen media atau komponen komunikan, sehingga efek yang diharapkan tak kunjung tercapai. Hambatan yang sewaktu-waktu datang seperti tidak kehadirannya aparatur yang menjadi komunikan dan terkadang dipengaruhi oleh komponen media sebagai alat bantu dalam mengkomunikasikan sebuah kebijakan kepada aparatur khususnya aparatur di BPPKB Kota Bandung.

Seorang komunikator akan mempunyai kemampuan untuk melakukan perubahan sikap, pendapat, dan tingkah laku komunikasi melalui mekanisme daya tarik jika pihak komunikan merasa bahwa komunikator ikut serta dengannya,

dengan kata lain pihak komunikan merasa adanya kesamaan antara komunikator dengannya. Disinilah pentingnya komunikasi yang efektif dalam implementasi kebijakan SITIKENCANA, pelaksana kebijakan harus bisa memberi kenyamanan kepada seluruh aparatur di BPPKB Kota Bandung agar implementasi kebijakan SITIKENCANA dapat terlaksana dengan baik

Komunikasi menggambarkan suatu proses yang menghubungkan unsur-unsur yang ada dalam komunikasi itu sendiri. Komunikasi kebijakan SITIKENCANA pada BPPKB Kota Bandung dimaksudkan untuk memudahkan aparatur dalam mengolah data diantaranya data masyarakat yang menggunakan KB dan data Keluarga Sejahtera. Dalam proses komunikasi, setiap unsur yang ada di BPPKB Kota Bandung merupakan penentu keberhasilan komunikasi kebijakan sehingga dapat tepat sasaran. Komunikasi yang dilaksanakan dengan sasaran kepada objek komunikasi yaitu aparatur BPPKB Kota Bandung pada khususnya dengan maksud untuk memberikan pemahaman tentang kebijakan SITIKENCANA dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.

Proses komunikasi kebijakan SITIKENCANA, berdasarkan mekanisme yang baik yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. Dengan komunikasi yang baik tersebut aparatur mengetahui nilai-nilai dalam proses komunikasi. Komunikasi kebijakan ialah proses komunikasi yang terjadi dalam suatu kebijakan dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja kebijakan tersebut Tugas inti dari aparatur adalah mengkomunikasikan kebijakan dengan baik, supaya objek komunikasi lebih paham dan mengerti tentang maksud dan tujuan dari materi yang di komunikasikan. Pesan-pesan yang disampaikan oleh aparatur kadangkala

berlainan dan tidak selamanya sejalan satu sama lain, tetapi proses komunikasi dapat berjalan lancar apabila pesan-pesan yang disampaikan oleh apartur tidak bertentangan atau saling mendukung satu sama lain.

4.1.1 Transmisi dalam Implementasi Kebijakan SITIKENCANA di BPPKB Kota Bandung.

Penyaluran komunikasi oleh BPPKB Kota Bandung dalam Implementasi kebijakan SITIKENCANA akan dapat menghasilkan suatu pelaksanaan yang baik apabila penyampaian informasi tersebut dilakukan sesuai dengan yang telah direncanakan. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari adanya penyampaian informasi yang tepat dan jelas sesuai dengan sasaran, dengan begitu informasi akan sampai dengan baik kepada seluruh aparatur. Proses penyampaian informasi mengenai SITIKENCANA yang dilakukan oleh aparatur BPPKB Kota Bandung sudah jelas dan dapat dimengerti oleh tiap aparatur Kecamatan Coblong.

Proses penyampaian Informasi kebijakan SITIKENCANA dilakukan oleh BPPKB Kota Bandung kepada aparatur Kecamatan Coblong, hal tersebut dilakukan agar kebijakan SITIKENCANA dapat tertransformasikan secara tepat kepada tiap aparatur Kecamatan Coblong. Penyampain informasi tersebut dilakukan dengan cara memberitahukan kepada tiap individu melalui kepala bagiannya bahwa pelaksanaan kebijakan SITIKENCANA dapat dilakukan dengan menggunakan jaringan Komputerusasi dan terkoneksi dengan bagian-bagian di BPPKB Kota Bandung. Penyampaian informasi juga dilakukan dengan

memberikan penjelasan-penjelasan secara jelas kepada aparatur BPPKB Kota Bandung sebagai pelaksana SITIKENCANA.

Penyampaian informasi yang dilakukan oleh BPPKP Kota Bandung ini tidak terbatas dari tatap muka antar aparatur saja, penyampaian informasi dilakukan juga dengan penyebaran surat edaran yang ditujukan kepada seluruh aparatur di BPPKB Kota Bandung, komunikasi antara Kepala bagian informasi BPPKB terhadap aparatur Kecamatan Coblong dalam menyampaikan Informasi kebijakan SITIKENCANA. Proses komunikasi ini berupa instruksi, petunjuk, penjelasan, perintah yang harus aparatur pahami dan dijalankan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Pemberian Intruksi kepada aparatur BPPKB Kota Bandung berupa surat perintah mengenai pelaksaan SITIKENCANA di BPPKB Kota Bandung, sedangkan petunjuk dan penjelasan mengenai kebijakan SITIKENCANA berupa cara pemakain dan kegunaannya, sedangkan perintah berbentuk tugas pelaksanaan yang jelas mengenai Kebijakan penggunaan SITIKENCANA dalam peningkatan tugas aparatur BPPKB Kota Bandung. Pemberian intruksi yang diberikan oleh BPPKB Kota Bandung berupa surat perintah yang dikeluarkan dari kepala bagian Informasi dalam penggunaan SITIKENCANA di BPPKB Kota Bandung. Petunjuk yang diberikan oleh bagian informasi baik berupa surat perintah dan petunjuk penggunaan SITIKENCANA. Petunjuk penggunaan diberikan melalui modul yang dikeluarkan untuk membantu aparatur di BPPKB Kota Bandung menjalakan dan mengoperasikan SITIKENCANA.

Penjelasan yang diberikan oleh Pusat Informasi terkadang menjadi tidak efektif karena pemahamana aparatur di BPPKB Kota Bandung yang kurang, kurangnya pemahaman apartur sendiri dikarenakan rasa khawatir dalam menjalankan SITIKENCANA. Ketakutan aparatur di BPPKB Kota Bandung takut hilangnya data keluarga dimasukan ke SITIKENCANA. Meskipun tidak efektif dalam memberikan penjelasan penggunaan SITIKENCANA, pusat informasi selalu memberikan pelatihan dan pemahaman terhadap pengunaan SITIKENCANA.

Pemberian informasi yang dilakukan oleh pusat informasi kepada aparatur di BPPKB Kota Bandung berupa pendidikan kilat dalam pemahaman mengenai SITIKENCANA. Pendidikan kilat berupa tata cara penggunaan SITIKENCANA dari awal pengoperasian dan bagaimana cara memasukan data keluarga ke dalam aplikasi SITIKENCANA dan menjelaskan hasil dari memasukan data keluarga. Pendidikan kilat mengenai SITIKENCANA dilakukan di lingkungan BPPKB Kota Bandung sendiri dengan para pelatih langsung dari bagian Pusat Informasi yang berasal dari bagian kepegawaian dan pengembangan SDM, pendidikan yang diberikan waktunya relatif singkat karena dengan pemberian pendidikan kilat mengenai SITIKENCANA. Pendidikan kilat mengenai SITIKENCANA belum maksimal ini bisa dilihat dari pemahaman para aparatur dalam menjalankan SITIKENCANA belum sepenuhnya dikuasai oleh aparatur, dan terlalu lamanya jarang waktu dalam pendidikan kilat kepada aparatur. Waktu pendidikan yang diberikan relative singkat karena selama para aparatur yang mengikuti pendidikan diberikan materi dengan durasi pertemuan

sebentar, oleh karena itu proses pendidikan pealtihan belum dikatakan maksimal dalam pengembangan sumber daya aparatur dalam aplikasi SITIKENCANA.

Transmisi dalam implementasi kebijakan SITIKENCANA dikatakan cukup baik, ini dibuktikan dengan banyaknya upaya yang dilakukan oleh pihak pelaksana kebijakan dalam menyampaikan informasi tentang penggunaan SITIKENCANA baik dari petunjuk penggunaan ataupun diberikan penjelasan langsung mengenai kegunaan SITIKENCANA kepada aparatur di BPPKB Kota Bandung.

4.1.2 Kejelasan dalam Implementasi Kebijakan SITIKENCANA di BPPKB Kota Bandung.

Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan. Penyampaian informasi dengan jelas, dapat dimengerti dan dipahami oleh seluruh aparatur BPPKB Kota Bandung merupakan faktor yang bisa menentukan keberhasilan dalam implementasi kebijakan SITIKENCANA . Penyampaian informasi SITIKENCANA itu sendiri dilakukan oleh bagian Informasi kepada aparatur di BPPKB, bentuk penyampaiannya melalui penjelasan bahwa SITIKENCANA adalah aplikasi yang akan memudahkan akselerasi penginputan data keluarga oleh aparatur BPPKB Kota Bandung lebih cepat dan akurat.

Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka kepada pihak yang

membutuhkan. Agar mudah diketahui, dipahami dan dimengerti oleh seluruh aparatur, baik diminta maupun tidak diminta.

Kejelasan informasi dalam kebijakan SITIKENCANA melalui penjabaran secara mendetail tentang buku panduan teknis agar bisa dimengerti dan dipahami oleh aparatur dalam menjalankan aplikasi SITIKENCANA . Kejelasam informasi tidak hanya mengenai buku panduan teknis akan tetapi kejelasan informasi dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada sesama aparatur. Kejelasan Kebijakan yang dibuat oleh aparatur BPPKB dalam implementasi kebijakan SITIKENCANA, kejelasan dalam menyampaikan informasi ini cukup, karena beberapa aparatur di BPPKB Kota Bandung masih ada yang belum paham tentang penggunaan SITIKENCANA itu sendiri akan tetapi paham akan tujuan penggunaan SITIKENCANA.

Kejelasan mengenai kebijakan SITIKENCANA bukan hanya mengenai pemberian kepada aparatur akan tetapi kejelasan akan pemahaman mengenai pengoperasionalan SITIKENCANA Kejelasan dalam kebijakan penggunaan SITIKENCANA akan baik apabila pemahaman akan SITIKENCANA oleh aparatur di BPPKB Kota Bandung, akan tetapi tidak pahamnya para aparatur mengenai penggunaan SITIKENCANA karena para aparatur yang berada di BPPKB Kota Bandung masih kebingungan apabila harus menggunakan komputer dengan alasan takut menghilangkan data-data yang penting oleh karena itu beberapa aparatur tidak paham dalam menjalankan Aplikasi SITIKENCANA. Ketidak pahaman para aparatur juga dikarenakan perpindahanan pegawai baru dari BPPKB Kota Bandung.

Kejelasan Kebijakan yang dibuat oleh BPPKB Kota Bandung dalam implementasi kebijakan SITIKENCANA, penyampaian informasi sudah cukup jelas, dapat dimengerti dan dipahami oleh aparatur BPPKB Kota Bandung, penggunaan SITIKENCANA tentunya akan mempermudah aparatur dalam pendataan keluarga yang prima karena sudah jelas dan dimengerti. Dalam memberikan kejelasan informasi tentang kebijakan SITIKENCANA. Pihak pelaksana kebijakan dalam hal ini BPPKB Kota Bandung melalui Pusat Informasi telah menjalankan langkah – langkah yang baik dalam mengupayakan kejelasan penyampaian informasi dalam kebijakan SITIKENCANA diantaranya adalah dengan membuat buku panduan teknis pelaksanaan SITIKENCANA dan memberikan pelatihan-pelatihan agar lebih paham dalam menjalankan SITIKENCANA.

4.1.3 Konsistensi dalam Implementasi Kebijakan SITIKENCANA di BPPKB Kota Bandung

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus konsisten atau tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, jangan sampai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menyimpang dari ketentuan dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya SITIKENCANA sesuai dengan ketetapan peraturan yang telah ditentukan. Dalam melaksanakan kebijakan SITIKENCANA berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga tidak menyimpang dari peraturan–peraturan yang dijadikan landasan hukum dalam pelaksanaan SITIKENCANA tersebut, dimana konsistensi yang dimaksud adalah dengan diadakannya secara

terus menerus perbaikan SITIKENCANA untuk mempermudah aparatur BPPKB Kota bandung dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Konsistensi penggunaan SITIKENCANA bisa dilihat dari perbaikan terus menerus dari segi aplikasi oleh Pusat Informasi sebagai unit yang bertanggung jawab dalam pengembangan atau perbaikan aplikasi SITIKENCANA supaya lebih baik dari segi aplikasi dan mudah dipahami oleh aparatur yang melaksanakannya di BPPKB Kota Bandung.

Dalam melaksanakan implementasi kebijakan SITIKENCANA di BPPKB Kota Bandung sebagai pelaksana kebijakan sudah berkonsisten dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Aparatur dalam menjalankan tugasnya tersebut tidak menyimpang dari ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku. Pihak pelaksana kebijakan tetap konsisten dalam menjalankan tugasnya dan juga konsisten. Peraturan-peraturan yang berlaku dan ditetapkan oleh BPPKB Kota Bandung dalam peningkatan penggunaan SITIKENCANA, peraturan yang berlaku selain harus sesuai dengan visi dan misi harus pula sesuai tugas pokok dan fungsi BPPKB Kota Bandung.

Pengembangan apliksai SITIKENCANA oleh Pusat Informasi semata-mata untuk memberikan kemudahan kepada aparatur di BPPKB Kota Bandung, pengembangan apliksai SITIKENCANA bukan hanya dari segi tampilan saja akan tetapi dari konten-konten yang ada di dalamnya lebih mudah dan dapat dipahami oleh aparatur di BPPKB Kota Bandung. Perubahan-perubahan dalam konten di dalam apliksai SITIKENCANA bisa terlihat disaat pengoperasionalnnya, dimana langkah-langkah disaat akan meng infut data tidak terlalu rumit dan bisa dipahami

oleh aparatur.perubahan konten lebih ke penyederhanaan pengoperasionalkan agar lebih efektif dan efisien.

Dengan demikian dalam konsistensi implementasi kebijakan SITIKENCANA yang dibuat oleh BPPKB Kota Bandung sudah cukup baik. Ini dibuktikan dengan mudah nya aparatur BPPKB Kota Bandung dalam pendataan kependudukan, keluarga berencana konsistensi dalam kebijakan SITIKENCANA ini dalam pengembangan aplikasi SITIKENCANA agar lebih mudah mengoperasioanalkan oleh aparatur di BPPKB Kota Bandung baik dari segi tampilan aplikasi dan proses dalam operasioanal tidak rumit dan dapat dipahami. Pengembangan SITIKENCANA bertujuan agar memaksimalkan kinerja aplikasi SITIKENCANA guna terciptanya penggunaan yang efektif dan efisien.

Implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif bila proses komunikasi yang dilakukan oleh aparatur BPPKB Kota Bandung dilakukan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan visi dan misi. Komunikasi dalam implementasi kebijakan SITIKENCANA melalui Komunikasi atau penyampaian informasi kepada aparatur di BPPKB Kota Bandung, kejelasan informasi dan adanya konsistensi penyampaian informasi. Proses komunikasi yang baik akan mendorong aparatur untuk dapat lebih meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat.

Dengan demikian Komunikasi pelaksanaan kebijakan SITIKENCANA sudah baik, proses komunikasi disini dikatakan baik karena proses komunikasi mengenai Implementasi kebijakan SITIKENCANA tidak berbelit-belit dari aparatur BPPKB Kota Bandung langsung ke aparatur Kecamatan Coblong.

4.2 Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan SITIKENCANA di BPPKB Kota Bandung.

Sumber daya dalam Implementasi Kebijakan SITIKENCANA memiliki beberapa komponen, komponen sumber daya ini meliputi jumlah *staff*, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yamg diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumber daya kebijakan, merupakan kebutuhan yang mutlak harus dilaksanakan pada setiap organisasi melalui perwujudan dan interaksi yang sinergis, sistematis dan terencana atas dasar kemitraan. Pengembangan sumber daya kebijakan di BPPKB Kota Bandung diarahkan kepada pembentukan birokrasi bermartabat. Birokrasi pemerintahan yang bersih, makmur, taat dan bersahabat. Bersih dalam arti bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, makmur dalam arti mampu memenuhi kebutuhan dasar dan berkeinginan untuk mencapai kehidupan dan penghidupan yang lebih baik. Taat dalam arti birokrasi memahami dan mentaati serta menjalankan norma-norma agama dan budaya serta peraturan-peraturan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pengembangan sumber daya aparatur bertujuan agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan informasi dalam melaksanakan tugasnya.

Pengembangan sumber daya aparatur diterapkan supaya aparatur mendapatkan pelatihan khusus dalam implementasi kebijakan SITIKENCANA. Dalam pelaksanaannya kebijakan SITIKENCANA sangat membutuhkan aparatur yang ahli dalam bidang teknis untuk mengoperasionalkan dan mengaplikasikan data-data yang tersimpan dalam komputer.

Dalam kebijakan SITIKENCANA, terdapat sumber - sumber kebijakan yang dapat menentukan keberhasilannya dalam menciptakan efisiensi kerja. Sumber-sumber kebijakan tersebut antara sumber daya manusia, Informasi, Fasilitas (sarana dan prasarana) dan wewenang. Sumber daya manusia yang ada di BPPKB Kota Bandung belum dapat dikatakan memadai, karena belum banyak aparatur yang menguasai bidang komputer yang dapat menunjang kebijakan SITIKENCANA. Oleh karena itu pelaksanaan kebijakan SITIKENCANA sudah terlaksana dengan baik tetapi belum maksimal, untuk mengatasi permasalahan akan penggunaan SITIKENCANA melakukan langkah pelatihan dan pendidikan aparatur untuk lebih ahli dalam bidang komputer yang dapat mendukung kebijakan SITIKENCANA.

Berdasarkan wawancara dengan aparatur BPPKB Kota Bandung Sumber daya manusia yang diperlukan adalah mereka yang ahli komputer karena akan dijadikan sebagai operator atau tenaga ahli komputerisasi di BPPKB Kota Bandung. Oleh karena itu, adanya pelatihan dan pendidikan sedikitnya dapat mengatasi kendala pada bagian pengoperasionalan komputer. Upaya yang dilakukan oleh bagian informasi keluarga memaksimalkan aparatur yang sudah

paham dalam pengoperasionalan SITIKENCANA supaya adanya pemahaman secara langsung bagi aparatur di BPPKB Kota Bandung.

Sumber daya manusia yang berpotensi diperlukan karena dapat memberikan dukungan mengenai kebijakan SITIKENCANA, sumber daya manusia yang diperlukan adalah yang mempunyai keahlian atau yang mampu dalam bidangnya. Pengembangan SITIKENCANA membantu pihak BPPKB Kota Bandung dalam hal penganggaran dana karena anggaran yang disediakan masih dirasa kurang dan dengan pengembangan oleh Pusat Informasi sedikit membantu pemerintah dan membantu peningkatan skill sumber daya manusia di BPPKB Kota Bandung.

4.2.1 Staff Dalam Implementasi Kebijakan SITIKENCANA di BPPKB Kota Bandung.

Sumberdaya manusia yang tidak memadahi (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik.Jika jumlah *staff* pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program.Untuk itu perlu adanya manajemen sumber daya manusia yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program.Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai komputer.

Kurangnya keterampilan-keterampilan pengelolaan merupakan masalah besar yang sering dihadapi oleh pemerintahan daerah begitu juga dengan BPPKB Kota Bandung, hal ini disebabkan oleh minimnya sumber daya manusia yang dapat digunakan atau untuk dilatih secara professional. Faktor lain adalah kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan administrator yang kompeten khusus dalam menjalankan administrator atau pengelola SITIKENCANA hanya beberapa orang yang lebih mengetahui, terlebih karena dengan sedikit orang yang bisa mengaplikasikan akan bisa lebih menjaga kerahasian keuangan BPPKB Kota Bandung.

Berdasarkan wawancara dengan aparatur BPPKB Kota Bandung Salah satu yang sering dihadapi BPPKB Kota Bandung sedikitnya para aparatur yang mempunyai keterampilan-keteramapilan pengelolan sebuah kebijakan, sedikitnya ketermapilan aparatur dikarenakan latar belakang propesional disaat pengangkatan jabatan tidak berdasarkan kemampuan-kemampuan para aparatur yang sesungguhnya. Tingkat pendidikan aparatur di loket pembayaran bermacam-macam mulai dari tamatan jenjang SLTA sampai dengan jenjang Strata 2, belum ratanya tingkat pendidikan tidak menjadi kendala karena Tingkat pemahaman aparatur dalam kebijakan SITIKENCANA di BPPKB Kota Bandung sudah cukup baik karena aparatur yang berada di BPPKB Kota Bandung memahami dan mengetahui kebijakan SITIKENCANA dalam upaya memberikan peningkatan pelaksanaannya kepada aparatur.

Kemampuan para aparatur khususnya aparatur bagian keuangan kepada aparatur di BPPKB Kota Bandung dalam menyampainkan program kebijakan

SITIKENCANA dan mengarahkan para aparatur dalam pemahaman SITIKENCANA sudah sangat baik karena itu sudah menjadi tuntuan bagi aparatur di bagian keuangan dalam memberikan pemahaman kepada aparatur di BPPKB Kota Bandung.

Sumber Daya Manusia merupakan hal yang dapat menentukan keberhasilan kebijakan SITIKENCANA dalam pelaksanaan aparatur. Proses pendataan di BPPKB Kota Bandung dapat dijelaskan sebagai berikut : *pertama*, adanya kemampuan untuk mengelola data keluarga, *kedua* mempunyai keahlian untuk memasukan data keluarga disaat menggunakan SITIKENCANA, *ketiga* mempunyai pengetahuan untuk menyajikan data akhir dari SITIKENCANA. Oleh karena itu, aparatur di BPPKB Kota Bandung adalah unsur penggerak dan pelaksana kebijakan SITIKENCANA. Dalam hal ini sumber daya manusia yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan SITIKENCANA adalah sumber daya manusia yang memiliki potensi yang handal atau aparatur yang mempunyai kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah tentang kebijakan SITIKENCANA tersebut.

Potensi yang handal tersebut di atas dapat dilihat berdasarkan kriteria yang diperlukan, kriteria yang utama diperlukan adalah mereka yang ahli dalam bidang komputer dan mampu untuk mengoperasionalisasikannya serta ahli dalam pelayanan informasi. Masih banyak para aparatur di BPPKB Kota Bandung yang kurang menguasai komputerisasi, dan banyak juga yang sudah menguasai dan ahli dalam mengoperasionalisasikan komputer. Sumber daya manusia yang ada di BPPKB Kota Bandung belum memadai, karena sebagain dari aparatur yang

mampu menguasai bidang komputer yang dapat menunjang keberhasilan kebijakan SITIKENCANA. Oleh karena itu terkadang pelaksanaan belum maksimal, untuk mengatasinya bagian keuangan melakukan langkah pelatihan dan pendidikan pegawai untuk lebih ahli dalam bidang komputer yang dapat mendukung keberhasilan kebijakan SITIKENCANA.

Kurangnya keterampilan aparatur di BPPKB Kota Bandung karena kurangnya pengelolaan-pengelolaan dari segi pelatihan yang belum maksimal, faktor lain yang terkadang menajadi kendala dalam kebijakan aplikasi SITIKENCANA dalam merekrut aparatur yang benar-benar layak seseuai dengan kemampuannya dan kompeten pada umumnya. Jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong sebuah kebijakan akan berhasil akan tetapi dengan sediktinya staf akan meamaksimalkan sebuah kebijakan dalam mencapi tujuan yang ingin dicapai, akan tetapi tidaklah cukup dengan jumlah pelaksana yang memadai tetapi para pelaksaan khususnya aparatur di BPPKB Kota Bandung harus memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan sebuah kebijakan.

Staf di BPPKB Kota Bandung sudah dianggap sanggup melaksanakan kebijakan SITIKENCANA dengan memberikan sebuah pelayanan yang lebih baik dan dengan sedikitnya jumlah staf di BPPKB Kota Bandung tidak akan menghambat pelaksanakan kebijakan SITIKENCANA tetapi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.Adanya kompetisi melalui indek kerja pegawai di seluruh pemerintahan termasuk di BPPKB Kota Bandung bisa merangsang aparatur untuk menunjukan kinerja lebih baik dengan pemberian bomus akan

mampu dalam menjalankan sebuah kebijakan dari pemerintah pusat khusus di BPPKB Kota Bandung tercapainya tujuan melalui SITIKENCANA.

4.2.2 Informasi dalam Implementasi Kebijakan SITIKENCANA di BPPKB Kota Bandung

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan efisien.Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan khususnya dalam kebijakan SITIKENCANA di BPPKB Kota Bandung, selain tentang kesanggupan aparatur dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan SITIKENCANA tersebut. Hal itu dimaksudkan agar para pelaksana khususnya aparatur di BPPKB Kota Bandung tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan bagaimana cara mengimplemtasikan atau melaksanakan kebijakan

SITIKENCANA tersebut. Disamping itu informasi penting menyadarkan aparatur yang terlibat dalam implementasi kebijakan SITIKENCANA agar diantara mereka mau melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajiban.

Dalam implementasi kebijakan SITIKENCANA diperlukan waktu yang cukup lama agar kebijakan tersebut dapat berhasil, akan tetapi bukan hanya waktu saja yang diperlukan melainkan manusia dan modal juga penting. Oleh karena itu ketiga faktor ini sangat mendukung keberhasilan SITIKENCANA apabila dapat dipenuhi. Waktu merupakan suatu penentuan agar kebijakan yang telah ada dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dalam menentukan waktu untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan SITIKENCANA tidak bisa ditentukan dengan cepat karena tidak hanya waktu saja yang diperlukan melainkan hal-hal lain yang dapat mendorong keberhasilan SITIKENCANA juga perlu diperhatikan

Informasi yang ada diberikan oleh BPPKB Kota Bandung merupakan suatu sistem untuk memfasilitasi aparatur melalui SITIKENCANA dalam mewujudkan efisiensi dan efektifitas nya. Informasi kebijakan SITIKENCANA disampaikan kepada aparatur secara: pertama akurat, bahwa aparatur di BPPKB Kota Bandung dalam menyampaikan informasi kebijakan SITIKENCANA harus benar mengenai data keluarga dan hasilnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua yaitu tepat waktu, bahwa aparatur di BPPKB Kota Bandung memberikan informasi waktu mengenai proses disaat pelaksanaannya. Ketiga aparatur di BPPKB Kota Bandung didalam memberikan informasi mengenai data keluarga.

Informasi dalam kebijakan SITIKENCANA mengenai bagaimana melaksanakan kebijakan tersebut. Aparatur di BPPKB Kota Bandung perlu mengetahui apa saja yang dilakukan dan bagaimana aparatur melakukan sebuah kebijakan SITIKENCANA. Dengan demikian aparatur di BPPKB Kota Bandung mampu melaksanakan kebijakan dengan petunjuk yang jelas mengenai kebijakan SITIKENCANA dan membahas aspek apa saja yang dibutuhkan dalam menjalankan kebijakan di BPPKB Kota Bandung. Pemberian informasi kepada aparatur di BPPKB Kota Bandung dalam menjalankan SITIKENCANA mulai dari pengoperionlan SITIKENCANA sampai dengan hasil dari penggunaan SITIKENCANA, pemberian informasi kepada aparatur tidak hanya pengoperasionalan sebuah aplikasi SITIKENCANA tetapi bagaimana memberikan pelaksanaan yang lebih baik kepada sesam aparatur.

Informasi mengenai program-program yang berada di BPPKB Kota Bandung adalah penting terutama disaat ada kebijakan-kebijakan baru atau kebijakan-kebijakan yang melibatkan persoalan teknis. Informasi yang didapatkan aparatur atau diberikan aparatur kepada sesama aparatur karena dengan adanya infomasi yang diberikan maka sebuah kebijakan akan terlaksana dengan baik dan tercapai apa yang ingin dituju melalui sebuah kebijakan yang telah ditetapkan dan di jalankan. Kurangnya informasi bisa mengakibatkan sebuah kebijakan tidak berjalan sesuai dengan rencana, kurangnya pengetahuan aparatur mengenai tanggung jawab dalam menjalankan sebuah kebijakan akan mengakibatkan sebuah kebijakan akan tidak efektif dan efisien.

Kebijakan aplikasi SITIKENCANA telah diinformasikan secara dengan baik beserta tanggung jawab yang ditanggung aparatur di BPPKB Kota Bandung mengenai bagaimana menjaga sebuah data informasi keluarga dan menjaganya lebih baik dan tanggung jawab. Informasi mengenai kebijakan SITIKENCANA terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh BPPKB Kota Bandung mengenai dasar hukum penggunaan kebijakan SITIKENCANA sampai dengan informasi peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan yang lebih baik kepada aparatur yang efektif dan efisien.

Informasi dalam implementasi kebijakan SITIKENCANA sudah cukup baik, para aparatur telah menjalankan Informasi disini berupa tindakan nyata dalam menyelesaikan tugasnya dalam melaksanakan tugasnya yang lebih baik melalui Aplikasi SITIKENCANA dalam peningkatan kinerja aparatur yang efektif dan efisien dan aparatur telah berusaha memenuhi apa saja kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh BPPKB Kota Bandung.

4.2.3 Wewenang dalam Implementasi Kebijakan SITIKENCANA di BPPKB Kota Bandung.

Kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lemabaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan menjadi penting kehadirannya ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengaharuskan mereka mengambil suatu keputusan.Manakala lembaga itu tidak diberikan kewenangan untuk membuat keputusan itu sendiri dalam memecahkan masalah yang dihadapi bukan saja wibawa lembaga itu saja.

Dalam implementasi kebijakan SITIKENCANA yang dilaksanakan oleh BPPKB Kota Bandung wewenang yang dimiliki khususnya di BPPKB Kota Bandung harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para pelaksana tidak terlegitimasi sehingga dapat mengagalkan proses pelaksanaan itu sendiri.Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Tetapi disisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

Penyebaran kewenangan melalui seksi-seksi bagian berdasarkan kebutuhan yang diperlukan melihat kondisi lapangan pekerjaan, penyebaran kewenangan dibutuhkan untuk lebih memaksimalkan kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugasnya yang cepat, tepat dan efektif demi tercapainya tujuan sesuai visi dan misi yang telah ditentukan. Terdapat penbatasan pada pengguna wewenang erektif dalam kebijakan SITIKENCANA sekalipun demikian sangsi-sangsi yang telah dimiliki oleh BPPKB Kota Bandung dapat meamainkan perannya yang penting bagi pelaksana kebijakan di BPPKB Kota Bandung. Dengan begitu sebuah kebijakan SITIKENCANA akan di taati oleh aparatur dalam menjalankan kebijakan demi menghindari kesalahan yang dibuat aparatur.

Kurangnya wewenang yang efektif disadari oleh para aparatur di BPPKB Kota Bandung, oleh karena itu para aparatur di BPPKB Kota Bandung menjalankan kerjasama yang baik dengan para aparatur-aparatur lainnya jika ingin mencapai sebuah kebijakan yang efektif dan efisien. Kewenanangan yang selalu diberikan dalam sebuah kebijakan selalu khusus, kebijakan kewenangan dalam pengoperasionlakan SITIKENCANA diserahkan kepada aparatur di BPPKB Kota Bandung dan kewenangan yang diberikan kepada aparatur terkadang oleh aparatur dianggap sebuah kewajiban yang harus dijalankan oleh aparatur tanpa terkecuali.

Pemahaman sebuah kewenangan dilakukan melalui sebuah pemberian penjelasan oleh aparatur di BPPKB Kota Bandung, pemahaman kewenangan bagi aparatur di BPPKB Kota Bandung yang dijelaskan bagaimana sebuah kontrol yang dilakukan kepada aparatur dalam menjalankan sebuah kebijakan. Kewenangan yang telah ditetapkan oleh BPPKB Kota Bandung kepada aparatur di BPPKB Kota Bandung harus ditaati dan dijalankan apabila dilanggar maka akan ada sebuah sangsi tegas yang diberikan kepada aparatur di BPPKB Kota Bandung karena lalay akan kewenangannya dalam bekerja atau menjalankan kebijakan SITIKENCANA.Kewenangan yang telah diberikan kepada aparatur di loket pembayaran terkadang tidak efektif disaat dilapangan karena banyaknya kendala-kendala yang terkadang di luar kemampuan para aparatur, kewenangan akan menjadi lebih efektif apabila para aparatur menjalankan semua kewenangan yang telah ditetapkan tanpa terkecuali.

Kewenangan dalam implementasi kebijakan SITIKENCANA masih cukup baik, wewenang yang diberikan oleh aparatur kepada aparatur di BPPKB Kota

Bandung melalui SITIKENCANA itu sendiri masih mengalami kendala. Diantaranya adalah aparatur tidak bisa mengeluarkan keputusan yang diluar tugasnya. Kewenangan yang dimiliki oleh aparatur di BPPKB Kota Bandung harus sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dan disahkan, kewenangan aparatur juga harus sesuai visi dan misi BPPKB Kota Bandung.

4.2.4 Fasilitas dalam Implementasi Kebijakan SITIKENCANA Di BPPKB Kota Bandung.

Badan Pemerintahan memerlukan fasilitas-fasilitas yang lengkap. Sumber daya peralatan di BPPKB Kota Bandung terdiri dari: peralatan umum yang dibutuhkan oleh suatu lembaga dan peralatan khusus untuk kepentingan tertentu. Penyiapan peralatan umum diarahkan pada perbaikan kondisi lingkungan kerja, seperti: adanya kenyamanan untuk bekerja di BPPKB Kota Bandung. Kondisi kerja yang nyaman harus ditunjang oleh peralatan yang lengkap dan terpelihara..

Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan. Infrastruktur, merupakan salah satu sumber daya penentu keberhasilan implementasi kebijakan SITIKENCANA. Sumber daya infrastruktur di BPPKB Kota Bandung bersumber dari anggaran BPPKB Kota Bandung. Ini merupakan salah satu usaha pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan pelayanan

Fasilitas fisik mungkin merupakan sumber penting dalam implementasi suatu kebijakan khususnya kebijakan SITIKENCANA. Seorang pelaksna

mungkin memiliki staff yang handal dan memahami kebijakan SITIKENCANA pada bangunan/ kantor untuk melaksanakan pekerjaannya tidak memadai kemungkinan implementasi kebijakan SITIKENCANA tidak akan terlaksana dengan baik. Falisitas-fasilitas yang berada di BPPKB Kota Bandung pada umumnya cukup baik karena beberapa kebutuhan seperti perkantoran sudah memadai, karena setiap bagian telah memiliki perkantoran yang memadai dan mendukung Aparatur dalam menjalankan tugasnya.

Pendukung lainnya dari fasilititas adalah dukungan dari segi Sistem informasi baik dari segi Hardware maupun Sofware masih belum maksimal karena dalam perkembangan ini menyangkut dana pengembangan sistem Informasi masih sangat kecil karena dana yang dialokasikan harus terbagi-bagi dengan program kebijakn lainnya meskipun dari segi pengembangannya telah memiliki satu unit yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi.

Dukungan dari segi Harware dan sofware dalam kebijakan SITIKENCANA sendiri masih perlu banyak perbaikan, karena menyangkut pendanaan yang besar yang mengakibatkan dukungan Harware dan sofware menjadi tidak maksimal dalam kebijakan SITIKENCANA itu sendiri.

Kendala lain yang sering menjadi penghambat dari kebijakan SITIKENCANA sendiri adalah sering rusaknya jaringan Local area network (LAN) yang menghubungkan ke berbagai bagian dalam mendukung kebijakan SITIKENCANA tidak berfungsinya jaringan tersebut menjadi penghambat bagi aparatur khususnya di BPPKB Kota Bandung, karena dengan kerusakan jaringan

maka infut data keluarga menjadi terlamabat yang harusnya langsung terhubung ke SITIKENCANA menjadi manual dan mengakibatkan pekerjaan yang berat di BPPKB Kota Bandung yang harus *Infut* data keluarga kembali.

Penyediaan fasilitas dan kelengkapan dalam mendukung sebuah kebijakan tidak selalu mudah karena untuk memenuhi semua itu menyangkut sebuah anggaran yang besar, anggaran yang besar bisa memenuhi semua penyediaan fasilitas dan kelengakapn dengan di dukung dengan sumber daya manusia yang handal, akan tetapi apabila anggaran pendukung besar dalam penyediaan fasilitas tanpa di dukung sumber daya manusia yang baik tidak akan efektif. Fasilitas yang berada di BPPKB sedang dalam proses perbaikan yang lebih baik karena BPPKB Kota Bandung ingin memberikan pelaksanaan yang lebih baik yang efektif dan efisien.

Dengan demikian sumber daya dalam Implementasi kebijakan SITIKENCANA di BPPKB Kota Bandung cukup baik. Tetapi belum maksimal di karenakan masih ada aparatur BPPKB Kota Bandung yang belum ahli dalam komputerisasi.

4.3 Disposisi dalam Implementasi Kebijakan SITIKENCANA di BPPKB Kota Bandung.

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor atau aparatur. Jika aparatur setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan yang akan di jalankan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat

kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah dan tidak tercapainya program yang telah dibuat.

Sikap yang harus di miliki aparatur terhadap kebijakan yang akan dijalankan meliputi ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program.Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

Kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yang diterapkan atau ditetapakan khusus di BPPKB Kota Bandung Dalam implementasi kebijakan SITIKENCANA, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para aparatur di BPPKB Kota bandung tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk

melakukan kebijakan SITIKENCANA Tersebut, tetapi aparatur Kebanyakan dapat mengimplementasikan kebijakan dengan leluasa. Alasannya adalah menyangkut dengan komitmen aparatur dengan ditetapkannya kebijakan dengan ketetapan dari BPPKB Kota Bandung sebagai sebuah komitmen pekerjaan.

Alasan lainnya adalah karena kompleksnya kebijakan itu sendiri. Bagaimanapun juga cara mana yang dilakukan implementor dalam melakukan keleluasaan itu, sebagain besar tergantung pada kecenderungan mereka terhadap suatu kebijakan. Kemudian sikap itu akan dipengaruhi oleh pandangan mereka terhadap suatu kebijakan yang diterapkan dan bagaimana melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan secara umum dan pribadinya.

Karakteristik atau sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan SITIKENCANA dapat dilihat melalui struktur birokrasi, norma-norma atau aturan dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Struktur birokrasi merupakan acuan dasar bagi pelaksana kebijakan mengenai pembagian tugas dan kewenangan yang diembannya. Aparatur BPPKB Kota Bandung dalam melaksanakan pekerjaannya selalu memperhatikan posisi jabatan yang diembannya. Sruktur birokrasi memegang peranan yang penting dalam pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan dan menciptakan kultur birokrasi yang kondusif.

Sikap merupakan salah satu dari budaya birokrasi, sikap ini merupakan kesepakatan individu tentang nilai-nilai bersama dalam kehidupan organisasi dan mengikat semua pelaksana kebijakan. Penerapan norma-norma di BPPKB Kota Bandung, sudah dilakukan sesuai peratutan atau tata tertib yang berlaku. Prinsip

ini selalu diingatkan oleh BPPKB Kota Bandung dalam setiap rapat koordinasi. Oleh karena itu, norma-norma akan menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh aparatur di BPPKB Kota bandung. Norma menentukan batas-batas normatif perilaku anggota organisasai, menentukan sifat dan bentuk-bentuk pengendalian dan pengawasan, menentukan gaya manajerial yang dapat diterima oleh aparatur, menentukan cara-cara kerja yang tepat di BPPKB Kota Bandung.

Secara spesifik peran norma-norma penting dilaksanakan oleh birokrasi. Dengan adanya norma tersebut diharapkan aparatur di BPPKB Kota Bandung, dapat menciptakan rasa memiliki terhadap organisasi, menciptakan jati diri para anggota organisasi, menciptakan keterikatan emosional antara organisasi dan pekerja yang terlibat didalamnya, membantu menciptakan stabilitas organisasi sebagai suatu sistem dan menemukan pola pedoman perilaku sebagai hasil dari norma-norma kebiasaan yang terbentuk dalam keseharian.

Karakteristik atau sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan SITIKENCANA dapat dilihat melalui komitmen, norma-norma atau aturan dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, jika pelaksanaan ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Komitmen-komiten aparatur di loket pembayaran dalam menjalakan kebijakan SITIKENCANA sesuai dengan visi dan misi dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyakat, komitmen yang ditunjukan oleh aparatur selalu dibarengi dengan pola hubungan-hubungan antar sesame aparatur dan hubungan bawahan kepada pimpinan yang baik agar mendukung kebijakan

SITIKENCANA dalam membantu kinerja aparatur khususnya di BPPKB Kota Bandung.

Sikap merupakan salah satu dari budaya birokrasi, sikap ini merupakan kesepakatan individu tentang nilai-nilai bersama dalam kehidupan organisasi dan mengikat semua pelaksana kebijakan. Penerapan norma-norma oleh BPPKB Kota Bandung, sudah dilakukan sesuai peratutan atau tata tertib yang berlaku. Prinsip ini selalu diingatkan oleh Kepala BPPKB Kota Bandung dalam setiap rapat koordinasi. Oleh karena itu, norma-norma akan menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh aparatur BPPKB Kota Bandung. Norma menentukan batas-batas normatif perilaku anggota organisasai, menentukan sifat dan bentuk-bentuk pengendalian dan pengawasan, menentukan gaya manajerial yang dapat diterima oleh aparatur, menentukan cara-cara kerja yang tepat di BPPKB Kota Bandung

Secara spesifik peran norma-norma penting dilaksanakan oleh birokrasi. Dengan adanya norma tersebut diharapkan aparatur BPPKB Kota Bandung, dapat menciptakan rasa memiliki terhadap organisasi, menciptakan jati diri para anggota organisasi, menciptakan keterikatan emosional antara organisasi dan pekerja yang terlibat didalamnya, membantu menciptakan stabilitas organisasi sebagai suatu sitem dan menemukan pola pedoman perilaku sebagai hasil dari norma-norma kebiasaan yang terbentuk dalam keseharian.

4.3.1 Komitmen dalam Implementasi Kebijakan SITIKENCANA di BPPKB Kota Bandung.

Pengaruh Disposisi atau Kecenderungan- kecendurungan pelaksana dalam implementasi kebijakan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan SITIKENCANA di BPPKB Kota Bandung. Hambatan-hambatan yang sering muncul adalah maksud umum dari suatu standar dan tujuan suatu kebijakan ketika para pelaksana khususnya aparatur tidak sepenuhnya menyadari dan memahami terhadap tujuan umum dari suatu standar dan tujuan sautu kebijakan diterapkan. Arah pemahaman pelaksana terhadap maksud dari suatu standard dan tujuan kebijakan merupakan hal penting. Pemahaman terhadap standard dan tujuan kebijakan merupakan sebuah potensi yang besar dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Tingkat komitmen dan kejujuran aparatur dalam implementasi kebijakan adalah hal terpenting dari Pengaruh Disposisi atau Kecenderungan-kecendurangan, karena dalam melaksanakan suatu kebijakan dapat mempengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksankan suatu kebijakan, keinginan dan kemauan seorang aparatur bisa dilihat dari pengetahuan dari suatu kebijakan dijalankan, pemahaman dan pendalaman suatu kebijakan dan penerimanan aparatur dalam kebijakan apakah menerima, menolak ataukah netral.

Komitmen yang dipegang oleh BPPKB Kota Bandung dalam melaksanakan implementasi kebijakan SITIKENCANA di BPPKB Kota Bandung telah sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 13 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis, mengatakan bahwa

Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efisiensi di lingkungan internal setiap instansi pemerintah, perlu diaplikasikan suatu sistem yang terintegrasi dengan penerapkan teknologi komunikasi dan informasi pada setiap unit yang ada dalam lingkungan operasionalnya sehingga menjadi sarana utama media pertukaran data di lingkungannya. Salah satu alat yang digunakan dalam penerapan sistem informasi di instansi pemerintah adalah perkantoran elektronis. Perkantoran elektronis mempunyai komponen utama, antara lain persuratan elektronis, pengarsipan elektronis, penelusuran surat, penelusuran disposisi, agenda harian, sistem basis data, dan sistem pengamanan. Untuk dapat menggunakan aplikasi perkantoran elektronis diperlukan pendukung sebagai berikut: perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komputer.

Komitmen BPPKB Kota Bandung merupakan suatu keputusan yang harus dicapai, sikap ini yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan karena dengan berkomitmen dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan tanpa meyelewengkan suatu pekerjaan apapun. Dalam melaksanakan implementasi kebijakan SITIKENCANA di BPPKB Kota Bandung tersebut, sepenuhnya mengacu pada dasar hukum tersebut. Hal tersebut dilakukan karena agar pelaksanaan SITIKENCANA dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Gangguan yang sering dialami oleh aparatur sering mengganngu kebijakan SITIKENCANA, gangguan yang sering terjadi ketika Jaringan penghubung antar bagian dalam mendukung SITIKENCANA sering mengalami gangguan, seringnya gangguan tidak merubah komitmen para aparatur di BPPKB Kota

Bandung dalam kebijakan SITIKENCANA. Para aparatur menjalankan komitmennya dengan didasari aparatur BPPKB Kota Bandung.

Standarisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi elektronik (*electronic document management system*) serta standarisasi meta – data yang memungkinkan pemakai menelusuri informasi tanpa harus memahami struktur informasi pemerintah merubah budaya demokrasi di seluruh pemerintahan daerah di Indonesia

Standarisasi dan prosedur dalam manajemen dokumen berakibat diterapakanya kebijakan SITIKENCANA yang menunut aparatur di BPPKB Kota Bandung yang harus menghilangkan budaya konvensional berpindah dengan sebuah era yang terkomuterisasi dan terkoneksi dengan bagian-bagian yang berkaitan dengan kebijakan SITIKENCANA.

Efek dari kebijakan penggunaan SITIKENCANA menuntut para aparatur di BPPKB Kota Bandung untuk lebih terhadap kemajuan teknologi yang mampu mengangkat kinerja aparatur dalam bekerja menjadi lebih baik dan efisien dalam bekerja, efek dari kebijakan SITIKENCANA merubah perspepsi tentang pelaksanaannya menjadi lebih baik dan diutamakan denga pelaksanaan yang efektif dan efisien.

Komitmen dalam kebijakan SITIKENCANA di BPPKB Kota Bandung sudah baik, karena telah melaksanakan kebijakan SITIKENCANA sesuai dengan surat keputusan BPPKB Kota Bandung mengenai penggunaan SITIKENCANA di BPPKB Kota Bandung mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan

SITIKENCANA seperti terintegrasinya secara keseluruhan untuk setiap aparatur BPPKB Kota Bandung.

4.3.2 Kejujuran dalam Implementasi Kebijakan SITIKENCANA di BPPKB Kota Bandung.

Kejujuran atau mengubah kecenderungan yang ada pelaksana melalui manipulasi Kejujuran oleh pembuat kebijakan melalui keuntungan-keuntungan atau biaya-biaya akan membuat pelaksana melaksanakan perintah dengan baik dalam implementasi kebijakan SITIKENCANA di BPPKB Kota Bandung. Merubah aparatur dalam birokrasi pemerintahan merupakan pekerjaan tersulit dan terkadang tidak menjamin proses implementasi berjalan sesuai tujuan. Umumnya para aparatur bertindak bertindak menurut kepentingannya sendiri dengan menambah keuntungan-keuntungan atau biaya tertentu akan mendorong pelaksanaan menjadi lebih baik meskipun itu diluar peraturan yang telah ditetapkan dimana para aparatur tidak diperbolehkan meminta sesuatu kepada masyarakat diluar administrasi dengan alasan untuk mempercepat proses pekerjaan.

Aparatur di BPPKB Kota Bandung memiliki sifat keterbukaan karena BPPKB Kota Bandung berhadapan langsung dengan aparatur. Para aparatur terkadang menangguhkan suatu keputusan yang mereka setujui dalam rencana peningkatan tujuan yang ingin dicapai.terkadang para aparatur menghindari dampak sepenuhnya dari suatu kebijakan dengan memandang selektif.

Sikap aparatur di BPPKB Kota Bandung dalam melaksanakan implementasi kebijakan SITIKENCANA, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan yaitu untuk akselerasi pelaksanaan aparatur yang efektif dan efisian sehingga dapat membantu proses pelaksanaan SITIKENCANA. Melalui sikap terbuka atau jujur tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang baik terhadap proses kerja para aparatur di BPPKB Kota Bandung.

Sikap keterbukaan yang dilakukan oleh aparatur di BPPKB Kota Bandung sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, hal tersebut terlihat melalui sikap keterbukaan pada aparatur di BPPKB Kota Bandung sebagai pengelola SITIKENCANA dan selanjutnya akan dilakukan data entry. keterbukaan atau jujur tersebut dapat memberikan dampak baik yang dirasakan oleh pelaksana kebijakan, dalam hal ini sikap keterbukaan yang dilakukan oleh apatur di BPPKB Kota Bandung telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sikap keterbukaan sebagai pelaksana kebijakan yang dimiliki oleh oleh apatur di BPPKB Kota Bandung merupakan wujud nyata Pemerintah dalam kinerjanya melalui kebijakan-kebijakan, bersikap jujur dengan menginformasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan data keluarga. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar tidak menimbulkan penyimpangan terhadap pengelolaan SITIKENCANA. Aparatur di BPPKB Kota Bandung dalam melaksanakan kebijakan SITIKENCANA juga dapat menerima masukan atau aspirasi dari setiap aparatur apabila dalam pelaksanaan kebijakan dinilai menyimpang dari kebijakannya. Kejujuran dalam kebijakan SITIKENCANA di BPPKB Kota

Bandung baik. hal tersebut terlihat melalui sikap keterbukaan pada aparatur di BPPKB Kota Bandung sebagai pengelola SITIKENCANA.

4.3.3 Sifat Demokratik dalam Implementasi kebijakan SITIKENCANA di BPKB Kota Bandung

Sifat demokrasik yang dimiliki apatur di BPPKB Kota Bandung merupakan bukti bahwa mereka menerima masukan atau aspirasi dari pihak lain dalam hal pelaksanaan tugas aparatur di BPPKB Kota Bandung sebagai penikmat dari kebijakan SITIKENCANA, apabila dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan komitmen yang sudah ditetapkan. Selain itu juga aparatur dapat memberikan kritik kepada operator SITIKENCANA, apabila kebijakan yang mereka terapkan tidak memberikan perubahan yang berarti dalam hal menciptakan akselerasi pelaksanaan tugas oleh aparatur.

Sikap tersebut merupakan sikap demokratis yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan yang mampu menerima masukan dari pihak lain, karena pelaksana kebijakan juga harus mempunyai sifat yang demokratis dalam mengambil keputusan agar keputusan yang dibuat tidak merugikan pihak lain. Sifat birokrasi terkadang membatasi perspektif para aparatur terhadap kebijakan subtantif dan kepentingan badan yang terkait. Para aparatur mempunyai orientasi yang sama dan menyetujui sebuah kebijakan yang telah ditetapkan dan melaksankana tanggung jawabnya secara menyeluruh.

Semua kritik dan aspirasi sebagai penikmat SITIKENCANA tetap akan ditanggapi sebagai masukan untuk lebih menciptakan akselerasi pelaksanaan yang

efektif dan efisien sehingga dapat membantu proses pelaksanaannya dapat tercapai.

Keuntungan-keuntungan yang akan didapat oleh aparatur di BPPKB Kota Bandung sesuai dengan indeks kinerja aparatur sesuai dengan ketetapan yang baru dari pemerintahan daerah, pendapatan yang didapat oleh aparatur akan dimiliki apabila kinerja aparatur dalam mengerjakan suatu pekerjaan baik pula. Mengubah aparatur dalam birokrasi pemerintahan merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan penuh rintangan yang dihadapi karena budaya yang tercipta sebelumnya telah menjadi budaya yang benar-benar mengakar. Proses kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah terkadang menjadi hambatan karena budaya aparatur yang tumbuh tidak mendukung dalam kebijakan yang ditetapkan.

Penambahan keuntungan-keuntungan untuk aparatur di BPPKB Kota Bandung akan mendorong para aparatur menjalankan kebijakan aplikasi SITIKENCANA menjadi lebih baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh BPPKB Kota Bandung sebagi penanggung jawab dalam menjalankan kebijakan SITIKENCANA. Hambatan-hambatan yang sering menjadi kendala dalam sebuah kebijakan yang diterapakan ketika para aparatur tidak sepakat dengan sebuah kebijakan yang diterapkan di sebuah badan atau intasi pemerintah. Para aparatur sering menghindari dampak sepenuhnya dari suatu kebijakan dengan memandang secara selektif dampak yang akan diterima aparatur.

Sifat demokratik dalam kebijakan SITIKENCANA di BPPKB Kota Bandung sudah cukup baik, karena sikap keterbukaan atau kejujuran merupakan salah satu ciri-ciri yang dimiliki oleh aparatur di BPPKB Kota Bandung. Melalui

sikap tersebut juga pelaksanaan SITIKENCANA yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik, sehingga akselerasi pelaksanaannya menjadi efektif dan efisian menjadi lebih baik.

Dengan demikian aparatur BPPKB Kota Bandung dalam implementasi kebijakan SITIKENCANA sudah baik, karena Norma-norma dalam menjalankan tugas itu diwujudkan dengan cara penegakan kedisiplinan, keramahan dan kesopanan.

4.4 Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan SITIKENCANA di BPPKB Kota Bandung.

Struktur organisasi sebagai pelaksana kebijakan memiliki peranan penting dalam kebijakan SITIKENCANA, salah satu aspek yang terpenting dalam organisasi adalah adanya *Standard Operating Procedures* (SOP). SOP adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan BPPKB Kota Bandung untuk mencapai tujuan. SOP merupakan tatacara atau tahapan yang dibakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Struktur birokrasi yang sudah ada di BPPKB Kota Bandung bertugas sesuai dengan masing-masing tugasnya, mereka menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang mereka jalankan.

Struktur birokrasi bertugas dalam melaksanakan kebijakan dan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standard Operating Procedures* atau SOP). Maksud dari aspek tersebut yaitu suatu prosedur standarisasi yang dilakukan oleh aparatur BPPKB Kota Bandung Dalam hal ini peran birokrasi sangat penting dalam pelaksanaan SITIKENCANA, karena melalui struktur birokrasi yang baik sebagai pelaksana kebijakan akan tercapai keberhasilan Implementasi Kebijakan SITIKENCANA.

Struktur birokrasi aparatur BPPKB Kota Bandung dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maksudnya sesuai dengan pembagian tugas masing-masing, sehingga tidak dibenarkan melaksanakan tugas yang bukan bagian dari kewenangannya. Apabila mereka melanggar, maka akan mendapat peringatan terlebih dahulu sebelum diberikan sanksi yang tegas. Hal tersebut dilakukan agar aparatur bekerja sesuai dengan kewenangan dan tugas pokoknya masing-masing, sehingga tidak ada satu pelaksana kebijakan melakukan tugas melebihi prosedur yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi yang baik akan memberikan dorongan kepada keberhasilan pelaksanaan SITIKENCANA, walaupun dalam pelaksanaan SITIKENCANA ini mengalami adanya kendala.

Tugas pokok dan fungsi tidak akan pernah lepas dari sebuah birokrasi terlebih aparatur di BPPKB Kota Bandung harus sesuai Struktur Organisasai dan kewenangannya dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Aparatur di BPPKB Kota Bandung telah sesuai visi dan misi dalam menjalankan kebijakan SITIKENCANA guna terciptanya kebijakan yang baik.

4.4.1 Standar Operating Prosedures (SOPs) dalam Implementasi Kebijakan SITIKENCANA di BPPKB Kota Bandung.

Standar operating procedures, merupakan hal yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan SITIKENCANA di BPPKB Kota Bandung. Standar operasi merupakan suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para aparatur untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BPPKB Kota Bandung. Salah satu aspek struktur birokrasi yang penting dari organisasi adalah standar operasional, maksud dari aspek tersebut adalah prosedur standarisasi yang dilakukan oleh BPPKB Kota Bandung dalam melaksanakan implementasi kebijakan SITIKENCANA oleh BPPKB Kota Bandung. untuk menciptakan pelaksanaan aparatur yang efektif dan efisien. dengan adanya standar operasioal pelaksanaan, maka implementasi kebijakan SITIKENCANA akan tercapai sehingga dapat menciptakan pelayanan kepegawaian yang efektf dan efisien dan akurat.

Pelaksanaan SITIKENCANA di BPPKB Kota Bandung, mempunyai standar operasioal dalam pelaksanaan SITIKENCANA di BPPKB Kota Bandung sejalan dengan meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pendokumenan sampai dengan pelaporan dalam rangka pengadaan rekap data keluarga dengan menggunakan sistem komputerisasi.

Standar operasi dalam pelaksanaan kebijakan SITIKENCANA sangat bermanfaat bagi terciptanya pelaksana SITIKENCANA. Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa dalam melaksanakan SITIKENCANA di BPPKB Kota Bandung dibutuhkan standar operasioal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya, dalam

pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar yang ditetapkan, agar dalam pelaksanaan implementasi kebijakan SITIKENCANA tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan menurut peraturan yang ada. Aparatur BPPKB Kota Bandung juga menjalankan tugas secara profesional, hal tersebut dilakukan bertujuan agar pelaksanaan kebijakan SITIKENCANA dapat terlaksana dengan baik.

Standard Operating Procedures memiliki manfaat sebagai berikut. Sebagai standarisasi yang wajib dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Menjamin proses yang telah ditetapkan dan dijadwalkan dapat berlangsung sebagaimana seharusnya. Menjamin tersedianya data untuk penyempurnaan proses. Meningkatkan akuntabilitas dengan melaporkan dan mendokumentasikan hasil dalam pelaksanaan tugas. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas. Memberikan cara konkrit untuk perbaikan kinerja. Menghindari terjadinya variasi proses pelaksanaan kegiatan dan tumpang tindih pelaksanaan tugas.

Peningkatan akuntabilitas pelaporan dan mendokumentasikan hasil pekerjaan di BPPKB Kota Bandung sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh BPPKB Kota Bandung dalam peningkatan kinerja aparatur dan mengefektifkan pelaksanaan menjadi lebih cepat dan tepat. Hasil pekerjaan yang dihasilkan oleh aparatur di BPPKB Kota Bandung berupa data keluarga selama berada di BPPKB Kota Bandung. Kurangnya sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan semestinya membantu dalam menjalankan penggunaan SOP yang berulang-ulang, para aparatur jarang

mempunyai kemampuan-kemampuan untuk menyelediki dengan seksama dan secara individual setiap keadaan yang dihadapi para aparatur di lapangan.

Aparatur di BPPKB Kota Bandung, dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maksudnya sesuai dengan pembagian tugas masing-masing, sehingga tidak dibenarkan melaksanakan tugas yang bukan bagian kinerjanya. Apabila mereka melanggar, maka akan mendapat sanksi tegas yang diberikan oleh Aparatur BPPKB Kota Bandung kepada aparatur yang melanggarnya. Hal tersebut dilakukan agar mereka bekerja sesuai dengan profesinya masing-masing, sehingga tidak ada satu aparatur di BPPKB Kota Bandung melakukan tugas melebihi prosedur yang telah ditetapkan.

Struktur organisasi di BPPKB Kota Bandung dalam melaksanakan penyelenggaraan kebijakan SITIKENCANA cukup harmonis dan kondusif, dengan kerja sama yang diterapkan secara kekeluargaan antara sesama aparatur di BPPKB Kota Bandung dan aparatur di BPPKB Kota Bandung. Selama melaksanakan tugas dalam memberikan pelayanan kepada aparatur telah melaksanakan tugas sesuai dengan mekanisme pelayanan yang telah ditetapkan.

SOP (Standar Operating Prosedur) dalam kebijakan SITIKENCANA di BPPKB Kota Bandung sudah baik. Ini terlihat dari banyaknya aparatur yang sudah mentaati standar operasional prosedur dalam menjalankan *S*ITIKENCANA di BPPKB Kota Bandung.

4.4.2 Fragmentasi dalam Implementasi Kebijakan SITIKENCANA di BPPKB Kota Bandung

Fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab kegiatan sangat mempengaruhi dalam Implementasi Kebijakan SITIKENCANA di BPPKB Kota Bandung. Hubungan yang terjadi diantara para pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, apabila pola hubungan yang terjadi di lingkungan birokrasi tidak baik maka akan berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan. Pola hubungan pelaksana kebijakan yang terjadi di dalam lingkungan BPPKB Kota Bandung berlangsung dengan baik, hal tersebut terwujud melalui pola kinerja mereka yang saling bekerja sama untuk mensukseskan pelaksanaan kebijakan SITIKENCA.

Penyebaran tanggungjawab para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas saling membantu dan bekerjasama serta berkompetisi secara sehat, hal itu dilakukan dalam membangkitkan semangat dalam mencapai keberhasilan kebijakan SITIKENCANA di BPPKB Kota Bandung. Para pelaksana kebijakan khususnya di BPPKB Kota Bandung dalam menajalankan tugasnya saling melengkapi dan mendukung masing-masing dari mereka, sehingga pola hubungan yang terjadi bersifat saling bekerjasama. Mereka tetap berkompetisi dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi kompetisi yang mereka lakukan dengan positif.

Penyebaran tanggungjawab tersebut terwujud dalam kinerja pelaksana kebijakan SITIKENCANA. Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, misalnya sub Bagian perencanaan, pelaporan dan pemasaran melalaui Pusat

informasi berkewajiban untuk menambah aplikasi yang sudah ada dari SITIKENCANA. BPPKB Kota Bandung berkewajiban untuk mengelola aplikasi SITIKENCANA tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab dari setiap masing – masing aparatur. Penyebaran tanggungjawab para pelaksana kebijakan di BPPKB Kota Bandung saling membantu, melengkapi dan mendukung satu sama lain dengan tujuan agar Kebijakan SITIKENCANA dapat berhasil dilaksanakan. Akan tetapi pola hubungan yang baik belum cukup dijadikan faktor keberhasilan SITIKENCANA itu sendiri, karena modal yang tersedia belum mencukupi dalam pelaksanaan SITIKENCANA.

Penyebaran tanggung jawab tersebut telah sesuai dengan stuktur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan oleh BPPKB Kota Bandung kepada aparatur di BPPKB Kota Bandung. Penyebaran tanggung jawab yang berada di BPPKB Kota Bandung bisa dilihat dari tugas masing-masing aparatur mulai dari aparatur yang bertindak sebagai administrator SITIKENCANA dalam memasukan data keluarga dan data demografi.

Konsekuensi yang paling dari fragmentasi birokrasi adalah usaha untuk menghambat kordinasi, para aparatur sering mendorong untuk menhindari kordinasi dengan badan-badan lain padala penyebaran tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakab-kebijakan yang telah ditetapkan yang membutuhkan kordinasi. Hal ini dibantu dengan struktur birokrasi yang buruk oelh struktur organisasi pemerintahan yang terpecah-pecah.

Fragmentasi atau penyebaran tanggungjawab kegiatan sangat mempengaruhi dalam kebijakan SITIKENCANA. Hubungan yang terjadi di antara para aparatur di BPPKB Kota Bandung sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan kebijakan SITIKENCANA, apabila pola hubungan yang terjadi di lingkungan BPPKB Kota Bandung tidak baik maka akan berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan SITIKENCANA. Hal tersebut terwujud melalui pola kinerja mereka yang saling bekerja sama untuk mensukseskan pelaksanaan kebijakan SITIKENCANA tersebut. Para pelaksana kebijakan SITIKENCANA dalam menjalankan tugas saling membantu dan bekerjasama serta berkompetisi secara sehat.

Bangkitnya semangat dalam mencapai keberhasilan kebijakan SITIKENCANA di BPPKB Kota Bandung dengan tujuan untuk mempermudah aparatur dalam melaksanakan tugasnya. Para aparatur di BPPKB Kota Bandung sebagai pelaksana kebijakan SITIKENCANA dalam menajalankan tugasnya saling melengkapi dan mendukung masing-masing dari mereka, sehingga pola hubungan yang terjadi bersifat saling bekerjasama. Mereka tetap berkompetisi dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi kompetisi yang mereka lakukan dengan positif dan sehat.

Berdasarkan uraian-urain diatas diatas mengenai Implementasi Kebijakan SITIKENCANA(SITIKENCANA) di BPPKB Kota Bandung telah diterapkan cukup baik hal ini di tandai dengan penerapan kebijakan SITIKENCANA dan adanya pembentukan badan khusus yang menangani pengembangan

SITIKENCANA dengan dibantu oleh sumber daya Manusia yang handal dalam bidangnya.

Penerapan kebijakan SITIKENCANA dikatakan cukup baik dikarenakan ada beberapa hal yang belum mendukung dari kebijakan yang diterpkan di BPPKB Kota Bandung ini ditandai dengan sering terganggunya jaringan yang membantu menghubungkan antar bagian yang berkaitan langsung dengan informasi keluarga. Rusaknya jaringan dikarenakan BPPKB Kota Bandung belum memiliki badan khusus teknis yang menangani hal jaringan meskipun adanya Pusat Informasi sebagai pengembang lanjutan SITIKENCANA belum menyentuh mengenai jaringan yang menjadi faktor utama dalam mensuksekan kebijakan SITIKENCANA dalam memberikan kemudahan kepada aparatur di BPPKB Kota Bandung.

Fragmentasi dalam kebijakan SITIKENCANA di BPPKB Kota Bandung sudah baik, bahwa Penyebaran tanggung jawab yang di berikan kepada aparatur di dalam lingkungan BPPKB Kota Bandung dalam menjalankan tugas saling bekerjasama, mereka tetap berkompetisi dalam melaksanakan tugasnya akan tetapi berkompetisi dengan cara sehat dan positif. Kompetisi tersebut menjadikan mereka lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya, oleh karena itu walaupun mereka berkompetisi dalam melaksanakan tugasnya tetapi pola hubungan mereka sebagai pelaksana kebijakan tetap terjaga dengan baik dan penuh dengan kerjasama diantaranya dengan aparatur di BPPKB Kota Bandung.

Dengan demikian stuktur birokrasi kebijakan SITIKENCANA dalam menjalankan tugas aparatur di BPPKB Kota Bandung sudah baik, karena struktur birokrasi di BPPKB Kota Bandung bertugas sudah sesuai dengan ketentuannya masing-masing tugasnya. Mereka menjalankan tugas secara profesional, hal tersebut dilakukan bertujuan agar pelaksanaan Implementasi Kebijakan SITIKENCANA dalam menciptakan akselerasi akan lebih efektif dan efisien.